

ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang)

Performance Analysis Of Local Government Financial Reports (At The Regional Financial Management Agency Of Sidenreng Rappang Regency)

Rezky Zahir

Email: rezkyzahir@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstract

The purpose of this study is to determine the Performance of the Government Financial Statements of Sidenreng Rappang Regency. This research was conducted at the Regional Financial Management Agency of Sidenreng Rappang Regency using the Activity Ratio, PAD Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio and Regional Financial Independence Ratio. The results of the study are that the activity ratio, the percentage level of operating expenditures, is in good criteria, while capital expenditures are still in poor criteria. The ratio of regional financial independence is still low, indicating that the source of regional revenue is still not optimal. The Effectiveness Ratio has succeeded in realizing Regional Original Income from the previously estimated or determined target so that the effectiveness ratio is at an effective level, while the regional financial efficiency ratio of Sidenreng Rappang Regency during 2019 is still at an inefficient level.

Keywords: Activity Ratio, PAD Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio and Regional Financial Independence Ratio

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan Rasio Aktivitas, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas PAD Dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian yaitu Pada rasio aktivitas tingkat presentase belanja operasi berada pada kriteria baik sedangkan untuk belanja modal masih berada pada kriteria kurang baik. Rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Rasio Efektivitas sudah berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dari Target yang diperkirakan atau ditentukan sebelumnya sehingga rasio efektivitas berada pada tingkat efektif, sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2019 masih berada pada tingkat kurang efisien.

Kata Kunci : Rasio Aktivitas, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas PAD Dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan negara. Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar akuntansi pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan Keuangan di Indonesia. Berbagai pihak mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda. Sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat yaitu diaudit dengan benar, dilaporkan secara lengkap, diaudit secara independen.

Pada penelitian yang meneliti tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan seperti Winidyaningrum.C dan Rahmawati (2010), Yudianta. Al dan Erawati (2011), Wansyah.H, Darwanis dan Bakar.U (2012), Delanno.FG dan Deviani (2013), Roshanti.A dan Sinarwati.K (2014) dan Ridha.M (2015)

Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa faktor sumber daya manusia baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Zuliarti (2012), Desmiyawati (2014), Rofika dan Ardianto (2014) menghasilkan bukti empiris yang berbeda yaitu kualitas sumber daya manusia secara parsial maupun simultan tidak memberikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya perbedaan hasil penelitian (*gap riset*) tersebut membuat peneliti ingin meneliti kembali hal tersebut di daerah yang berbeda, waktu yang berbeda dan satuan kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui apakah faktor kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern.

Salah satu hasil dalam penelitian ini adalah adanya temuan kelemahan pada sistem pengendalian intern sehingga berdampak pada pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jika sistem pengendalian intern dalam pelaksanaannya lemah maka pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak tertib, tidak transparan dan tidak akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Arfianti.D dan Kawedar.W (2011), Roshanti.A Sujana.E dan Sinarwati.K (2014) dan Darmayani.A.M, Herawati.T.N dan Atmaja.T.A (2014), menemukan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh Azlina.N dan Desmiyawati (2012) dan Suwardiman (2016) menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai pemanfaatan komputer dan berbagai teknologi lain dalam mendukung tugas pimpinan/organisasi, dengan komponen-komponen: ketersediaan mesin (*hardware/software*), jaringan (*network*), kesiapan aplikasi (*procedures/ application*), personil (*brainware/peopleware*), database, dan pemakai serta lingkungannya (*user and environment, social context, the culture of the people and groups involved*). Winidyaningrum.C & Rahmawati (2010) dan Ridha.M (2015) dalam penelitiannya memberikan bukti adanya pengaruh positif dan signifikan

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi 6 laporan keuangan pemerintah. Namun penelitian Arfianti.D dan Kawedar.W (2011), Darmayani.A.M, Herawati.T.N dan Atmaja.T.A (2014) dan Nasir.A dan Oktari.R (2010) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.

Adanya perbedaan hasil penelitian (gap riset) tersebut membuat peneliti ingin meneliti kembali hal tersebut di daerah yang berbeda, waktu yang berbeda dan satuan kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui apakah faktor pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *stewardship theory* sebagai teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Stewardship theory* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Asumsi penting dari *stewardship theory* adalah manajemen meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007).

Hasil pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan berita yang dikutip oleh "BeritaSidrap.com" bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menerima penghargaan Menteri Keuangan RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2018 dengan Opini Tanpa Pengecualian (WTP) Penghargaan diserahkan Gubernur Sulsel, H M Nurdin Abdullah kepada Bupati Sidrap, H Dollah Mando pada seminar dalam rangka Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-73 di Balai Diklat Keuangan Makassar, Selasa (29/10/2019).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini dilakukan di sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Waktu Penelitian dilakukan pada November 2019 sampai dengan Januari 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas 2 teknik pengumpulan data, yaitu teknik Dokumentasi dan Wawancara. Metode Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode ini adalah suatu metode analisis dimana data-data yang dikumpulkan dan digolongkan atau dikelompokkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rasio Aktivitas
 - a. Rasio Belanja Operasi Rasio Belanja Operasi

$$= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$
 - b. Rasio Belanja Modal Rasio Belanja Modal

$$= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+ Provinsi+ Pinjaman}} \times 100\%$$
3. Rasio Efektivitas PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$
4. Rasio Efisiensi PAD

$$= \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Rasio Aktivitas

Adapun kriteria penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai dengan rasio aktivitas sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Penilaian Aktivitas Keuangan Daerah

Presentase	Aktivitas Keuangan Daerah
0%-50%	Tidak Baik
50%-100%	Baik

(Halim 2007:236):

a. Rasio Belanja Operasi

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasi} &= \frac{820,325,607,961.00}{1,085,124,200,093.86} \times 100\% \\ &= 0,756 = 75,6\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan Operasi, Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang berada pada persentase 75,6%. Berdasarkan kriteria penilaian aktivitas, maka aktivitas belanja operasi keuangan daerah berada pada kriteria Baik.

b. Rasio Belanja Modal

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal} &= \frac{262,446,108,782.86}{1,085,124,200,093.86} \times 100\% \\ &= 0,242 = 24,2\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Modal maka aktivitas belanja modal keuangan kabupaten sidenreng rappang tergolong tidak baik karena tingkat persentase hanya sebesar 24,2%.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2. Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004: 189

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\begin{aligned} &= \frac{125,734,083,925.72}{1,003,569,661,429.00} \times 100\% \\ &= 0,125 = 12,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh hasil bahwa Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong rendah sekali dengan persentase kemandirian sebesar 12,5% dengan pola hubungan Instruktif. Artinya Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dan Kabupaten Sidenreng Rappang belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara penuh.

3. Rasio Efektivitas PAD

Tabel 3 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{125,734,083,925.72}{143,444,241,000.00} \times 100\% \\ = 0,877 = 87,7\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas, diperoleh hasil perhitungan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng pada tingkat kurang efektif.

4. Rasio Efisiensi PAD

Tabel 4 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10 %	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40 %	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2010:143)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,085,124,200,093.86}{1,235,859,131,692.56} \times 100\% \\ = 0,878 = 87,8\%$$

Rappang tergolong Kurang Efektif dengan persentase 87,7%.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Maka diperoleh persentase efisiensi sebesar 87,8% yang berarti bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih tergolong tidak efisien.

Pembahasan

1. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah belanja operasi Kabupaten sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari tahun 2018. Namun jumlah belanja modal justru mengalami penurunan. Hal ini berarti selama tahun 2019 Pemerintah daerah berfokus pada operasional Pemerintahan Daerah. Dan belum berfokus pada belanja modal pembangunan sebab tingkat presentase belanja operasi berasal pada kriteria baik sedangkan untuk belanja modal masih berada pada kriteria kurang baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh Dora Detisa pada tahun 2015 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Khusus Pada Pemerintahan Naggroe Aceh Darussalam yang menyatakan bahwa Untuk rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2007, terjadi kenaikan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kabupaten yang berada di propinsi NAD dalam rasio PAD/TPD setelah diberlakukannya otonomi khusus. Artinya terjadi kenaikan tingkat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah untuk beberapa Kabupaten di NAD. Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio efektivitas dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah, kemampuan pemerintahan Kabupaten yang berada di propinsi NAD didalam menjalankan tugasnya selama kurun waktu tahun (2005 s/d 2007) setelah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah menunjukkan bahwa

Kabupaten yang berada di propinsi NAD belum efektif dan efisien. 3. Didalam pengukuran terhadap rasio aktifitas dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintahan kabupaten-kabupaten yang berada di propinsi NAD setelah pemberlakuan kebijakan otonomi khusus masih diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin, sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah mampu membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengatakan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah masih berada pada indikator rendah sekali.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, dimana peran Pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Rasio kemandirian masih rendah menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih relative utang PAD yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian ini didukung oleh Epivani Rima De Villanova, pada tahun 2015 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Periode 2009- 2012 yang menyatakan bahwa Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunung kidul dari tahun 2009-2012 masih sangat kurang. Kinerja Pemerintah didalam memungut PAD (dalam hal ini Pajak Daerah) sudah efisien Secara umum kinerja keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung kidul menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil.

3. Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Rasio Efektivitas, hasil yang diperoleh adalah bahwa selama tahun 2019 efektivitas keuangan daerah kabupaten sidenreng rappang berada pada tingkat kurang efektif. Hal ini pemerintah daerah belum berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dari Target yang diperkirakan atau ditentukan sebelumnya. Sehingga potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang belum maksimal untuk menunjang pembangunan daerah kabupaten Sidenreng Rappang. Sementara tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2019 masih berada pada tingkat kurang efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan belanja (output) lebih dari 80% dibanding jumlah pendapatan (input).

Hasil penelitian ini didukung oleh Hony Adhiantok o, pada tahun 2013 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011) yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat KurangKinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tidak efektif

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan



Simpulan pada penelitian ini yaitu Rasio Aktivitas tahun 2019 tingkat presentase belanja operasi berada pada kriteria baik sedangkan untuk belanja modal masih berada pada kriteria kurang baik. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Rasio Efektivitas tahun 2019 keuangan daerah kabupaten sidenreng rapping masih berada pada tingkat kurang efektif. Sementara tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rapping selama tahun 2019 masih berada pada tingkat kurang efisien.

Saran

1. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan sumber potensi pendapatan yang telah ada, harus menginisiatif dan meningkatkan kreatifitas dalam membangun sumber sumber penerimaan Daerah.
2. Pemerintah Daerah harus mencari jalan untuk mengatasi kekurangan pembiayaan agar otonomi Daerah di Kabupaten Sidenreng Rapping dapat berjalan secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2012. *Metodelogi penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Abdul Hafidz. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPKD dan Pemerintah Daerah Jilid 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Gideon., Hariadi. 2007, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. (Tidak Publikasi) Pascasarjana UPNV Jatim. Surabaya
- Abdul Halim. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- Mohammad Mahsud. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas MuhMuria Kudus.
- Adi, Priyo Hari. 2012. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXI, No. 1. Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)*
- Azlina,N dan Desmiyawati. 2012. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi (Survey Pada Rumah Sakit di Provinsi Riau)*. Pekbis Jurnal 4 (1) : 124- 130
- Roshanti, Arina, dkk. 2014. *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. (Volume 2 No:1 Tahun 2014)

- Yudianta dan Erawati. 2011. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Makalah. Universitas Udayana Bali
- Suwardiman. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Pengelolaan PNBPN Pada Satker Pengadilan Agama di Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali*. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Mataram
- Desmiyawati. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD PEMDA Riau)*. Universitas Riau.
- Rofika dan Ardianto. 2014. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Peundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jurnal Vol. 2 No. 2
- Rahardjo. Budi. 2007. *Keuangan Akuntansi*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Muhammad Ridha. 2015. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris Pada Satker di Jajaran Kanwil Kemenag. Prov. Sumatera Barat)*.
- Winidyaningrum, Celvita dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi : Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto
- Wansyah, Hendara, Dkk. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Kapasitas Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD Pada Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala 1 (1) : 43-48, ISSN 2302-0164
- Darnayani, Herawati, Dkk. 2014. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan pada Bagian SETDA Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ekonomi, Jurusan Akuntansi
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*.
- Tarigan, Raja Malem. 2012. *Pengaruh Desentralisasi Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan:
- Ramadhan, Rachmat Sandy (2014) *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.